

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan berbangsa dan bernegara senantiasa berdampingan dengan kegiatan politik. Membahas tentang politik, Indonesia yang merupakan negara demokrasi tidak terpisahkan dari eksistensi partai politik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 1 Ayat (1) yaitu bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 .

Partai politik sebagai salah satu lembaga yang berperan menyalurkan aspirasi masyarakat memiliki kepentingan dan tujuan tertentu dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah sesuai dengan visi, misi dan cita-cita partainya. Partai politik sebagai agen penyalur aspirasi masyarakat berusaha untuk mendapatkan kedudukan di Parlemen. Partai politik akan mendapatkan kursi di Parlemen jika berhasil mengumpulkan suara dalam pemilihan umum. Mengumpulkan suara masyarakat dalam pemilihan umum memerlukan strategi yang tepat. Setiap 5 tahun pada periode pemilihan umum selalu muncul bakal calon legislatif baru. Bakal calon legislatif ini ada yang wajah

baru dalam politik dan ada juga pemain lama yang sudah malang melintang dalam perpolitikan. Bakal calon legislatif jika memenuhi persyaratan akan menjadi calon legislatif yang diusulkan oleh partai politik pengusungnya. Menjelang pelaksanaan pemilihan umum, selama masa kampanye partai politik berlomba-lomba menarik simpati masyarakat dengan mempromosikan calon legislatif dari partainya supaya dilirik masyarakat untuk dipilih.

Masyarakat akan menilai para calon legislatif ini baik secara kehidupan pribadinya, kinerjanya dalam masyarakat maupun menyeluruh melihat partai politik yang mengusungnya. Untuk mendapatkan simpati masyarakat, partai politik harus memiliki visi, misi, dan tujuan yang baik dan diinginkan masyarakat, bukan hanya sekedar keinginan partainya saja. Partai politik harus memiliki calon legislatif sebagai figur yang dicintai dan diinginkan oleh masyarakat untuk dijadikan legislatif. Mendapatkan figur partai yang dicintai masyarakat tentu ada prosedur tersendiri dan tidaklah didapat dengan cara instan melainkan melalui proses. Salah satunya melalui pendidikan politik.

Menurut Kartono (dalam E Handoyo & Lestari, 2017) mengatakan, bahwa: pendidikan politik adalah pendidikan orang dewasa dan diberikan kepada generasi muda untuk diarahkan menjadi kader-kader politik yang akan berkompetensi memenangkan kegiatan politik. Pendidikan politik juga merupakan pendidikan terstruktur untuk setiap individu agar memiliki kepribadian politik, kesadaran politik, dan dapat berpartisipasi serta bertanggung jawab baik moral maupun etis demi tercapainya tujuan politik masyarakat, bangsa, dan negara .

Pendidikan politik diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, pendidikan non formal melalui kursus, pelatihan, serta dalam pendidikan informal yaitu berupa pendidikan dalam keluarga, lingkungan sosial, pengajian, pentas seni budaya, lembaga swadaya masyarakat (LSM), partai politik, dll. (E Handoyo & Lestari, 2017). Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, disebutkan bahwa partai politik sebagai salah satu lembaga pendidikan politik, dimana ia memiliki tiga fungsi, yakni menyiapkan kader kepemimpinan nasional baik legislatif maupun eksekutif, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pendidikan politik. Pendidikan politik pada internal partai dilaksanakan dalam bentuk kaderisasi. Terkadang proses kaderisasi ini tidak berjalan dengan maksimal, contohnya saja dalam mencalonkan legislatif ataupun kepala daerah, partai politik bukan mengambil kader terbaiknya, tetapi bisa saja mengambil kader dari partai lain.

Selain dilaksanakan dalam internal partainya, partai politik juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Partai politik melakukan pendidikan politik kepada masyarakat mengenai strategi memilih calon legislatif dalam pemilu. Tetapi kenyataannya di lapangan banyak ditemukan partai politik yang mendidik masyarakatnya berpolitik dengan politik uang. Sering kita mendengar istilah “serangan fajar” menjelang hari-hari pemilihan umum. Serangan fajar dijalankan oleh para politisi nakal atau simpatisan partai dengan melakukan praktik membagi-bagikan uang kepada masyarakat supaya masyarakat memilih calon tertentu. Pendidikan politik juga bisa

memanfaatkan media sosial. Media sosial sebagai sarana pendidikan politik seharusnya tidak dijadikan tempat untuk menyebarkan hoaks ataupun ujaran kebencian terhadap calon legislatif tertentu. Terkadang partai politik yang seharusnya bertanggung jawab melakukan pendidikan politik ini, justru menjadi perusak moral dan etika politik dengan memunculkan kata-kata, kalimat, atau jargon-jargon propaganda, misalnya munculnya tanda pagar (tagar) tertentu yang menyinggung calon legislatif lainnya. Efeknya bukan pendidikan politik yang didapat melainkan memicu bibitbibit perpecahan dalam masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang pendidikan politik menegaskan bahwa pentingnya pendidikan politik sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan politik dilakukan oleh partai politik supaya masyarakat sadar berpolitik dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa dan negara. Komunikasi politik yang baik seharusnya menciptakan pendidikan politik dan demokrasi masyarakat yang sehat. Bukan dijadikan ajang saling sindir menyindirnya para elit politik. Tindakan yang memecah belah masyarakat seperti ini membuktikan kegagalan pendidikan politik yang dilakukan partai politik. pendidikan politik dalam masa kampanye partai politik dalam perspektif undang-undang pemilu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kampanye dan diatur dengan jelas dalam undang-undang pemilu, namun partai politik tidak menjalankan sesuai dengan amanah undang-undang (Syahrani et al., 2016). Pendidikan politik ini sangat penting bagi masyarakat yang kurang beruntung secara pendidikan dimana mereka

yang tinggal di lingkungan pendidikan rendah, yang mungkin tidak memiliki akses ke pendidikan kewarganegaraan berbasis sekolah (Smith, 2017).

Seyogianya, pendidikan politik dapat mendidik masyarakat untuk saling menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Partai politik mendidik masyarakat dengan cara yang etis dan beradab dalam menarik simpati masyarakat. Sehingga setelah pemilihan umum selesai, masyarakat akan legowo menerima kemenangan atau kekalahan dari calon legislatif yang didukungnya. Masyarakat bersatu menerima siapa yang menduduki parlemen dan mendukung pembangunan kemajuan bangsa dan negara dengan tidak menghujat calon legislatif ataupun pendukung yang tidak maju ke Parlemen.

Pada pemilihan umum legislatif Rabu, 17 April 2019 di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Pada Rabu 14 Agustus 2019, telah dilantik sebanyak 45 orang legislatif (anggota DPRD) Kabupaten Polewali Mandar periode 2019-2024. Perolehan Kursi diantaranya Partai Golkar memperoleh 6 Kursi, Partai Kebangkitan Bangsa meraih 6 Kursi, Partai Gerindra 6 Kursi, Partai PDI Perjuangan 5 Kursi, Partai Nasdem 5 Kursi, Partai Demokrat 5 Kursi, Partai PAN 4 Kursi, PKS 3 Kursi, PPP 3 Kursi, Perindo dan Partai Hanura masing-masing 1 Kursi. Melihat banyaknya partai yang eksis di Kabupaten Polewali Mandar, seharusnya media Pendidikan Politik sudah terbangun dengan baik karena Partai politik bisa menjalankan perannya dalam pemberian pendidikan politik (Rahayu, 2019).

Partai Amanat Nasional merupakan partai yang cukup Eksis di Kabupaten Polewali Mandar, Terbukti dalam kontestasi politik bisa mendapatkan 4 Kursi

untuk memberikan wakilnya pada legislatif. Walaupun terjadinya penurunan kursi dikarenakan pada pemilu tahun 2014 Partai Amanat Nasional Kabupaten Polewali Mandar mendapatkan 5 kursi bahkan menjadi pimpinan DPRD karena menjadi pemenang kedua di Polewali Mandar. Sehingga peran partai politik yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dalam menjalankan fungsi dan peranannya melakukan pendidikan politik bagi kader dan pemilih, kiranya sangat menarik untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana sebuah partai politik melakukan proses pendidikan politik baik pada anggota maupun warga masyarakat. Sehingga dari latar belakang yang telah diuraikan, peneliti menuangkan dalam sebuah Tesis dengan mengambil judul “Pendidikan Politik Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Polewali Mandar”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari perumusan masalah di atas penelitian ini merumuskan beberapa masalah, oleh karena itu pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pendidikan Politik Partai Amanat Nasional di Kabupaten Polewali Mandar 2019 ?
2. Kendala-Kendala apakah yang dihadapi partai Amanat Nasional dalam melaksanakan pendidikan Politik di Polewali Mandar ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional di Kabupaten Polewali Mandar
2. Untuk menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi partai Amanat Nasional dalam melaksanakan pendidikan Politik di Polewali Mandar ?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai kajian ilmiah tentang Pendidikan Politik, khususnya Pendidikan Politik yang seharusnya dilakukan oleh Partai Politik
2. Sebagai sumber referensi bagi penelitian berikutnya khususnya mengenai referensi mengenai Pendidikan Politik